

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan pilar utama pembangunan, karena sangat menentukan kemajuan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah pengelolaan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, terutama dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan oleh derajat kesehatan, tingkat intelegensi, kematangan emosional dan spiritual, serta produktivitas sangat ditentukan oleh kualitas pada usia dini, yaitu dari janin hingga berusia 5 tahun. Masa usia dini merupakan masa kritis bagi pertumbuhan seseorang. Di tahun-tahun pertama kehidupan terjadi perkembangan yang pesat, interaksi anak dengan lingkungan terutama keluarga akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan di masa mendatang (Herawati, 2019:2).

Keluarga yang berkualitas akan menghasilkan generasi yang sehat, cerdas dan tangguh. Masa 5 tahun kebawah merupakan masa emas (*golden age*) bagi perkembangan kecerdasan anak. Pada usia 0-5 tahun, kapasitas kecerdasan anak telah mencapai 80%, hal ini menunjukkan pentingnya memberikan rangsangan pada anak usia dini. Dalam hal ini, peran orangtua menjadi sangat penting, karena orangtua yang mengasuh, membimbing dan memberikan berbagai stimulasi agar tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal. Dengan pengasuhan yang tepat, kualitas sumber daya di Indonesia akan meningkat (Direktorat BKB dan Anak, 2022:2).

Dalam kaitannya dengan pengasuhan anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (seterusnya disebut BKKBN) sesuai dengan UU nomor

52 tahun 2009 adalah lembaga non-kementerian yang memiliki tugas meningkatkan kualitas anak dengan memberikan akses yang mendukung informasi, pendidikan penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak (Herawati, 2019:4). Namun, berdasarkan peraturan presiden nomor 180 dan 181 tahun 2024, nomenklatur BKKBN berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (seterusnya disebut Kemendukbangga).

Menurut peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka struktur organisasinya di tingkat nasional BKKBN memiliki menteri dan wakil menteri yang dibawahnya terdapat 3 inspektorat utama yaitu, inspektorat program, inspektorat keuangan dan perbekalan dan inspektorat ketenagakerjaan dan administrasi umum serta 5 sekretariat utama yaitu, biro perencanaan, biro kepegawaian, biro keuangan dan pengelolaan BMN, biro hukum, biro organisasi dan humas serta biro umum. Untuk setiap provinsi terdapat perwakilan BKKBN provinsi dan terdapat 6 bidang yaitu bidang pengendalian penduduk, bidang lini lapangan, bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, bidang advokasi, penggerak dan informasi serta yang terakhir bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Ditingkat kabupaten/kota terdapat Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD/KB) yang menaungi atau melaksanakan tugas dari Kemendukbangga. Di kabupaten Bireuen sendiri, OPD/KB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB). Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dibantu oleh sekretaris dan 4 kepala bidang yaitu, bidang kelembagaan, bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, bidang

pemberdayaan perempuan dan terakhir bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sedangkan ditingkat kecamatan ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai koordinator.

Peran BKKBN diperlukan untuk mengadvokasi, melayani dan membuka pikiran masyarakat akan pentingnya penanaman nilai-nilai kehidupan berbangsa bagi anggota keluarga sejak dini. Hal tersebut akan menjadikan keluarga sebagai wahana yang tangguh bagi terwujudnya keluarga yang berkualitas, karena keluarga menjadi ujung tombak dalam upaya memantapkan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses keberhasilan suatu negara sangat ditentukan sejauh mana masyarakatnya mempunyai karakter yang kondusif untuk bisa maju, untuk itu BKKBN menggencarkan pemahaman mengenai parenting terutama di desa-desa, praktiknya melalui Bina Keluarga Balita (seterusnya disebut BKB). Ini merupakan salah satu program BKKBN yang sangat peduli terhadap pengasuhan (Direktorat BKB dan Anak, 2022:3).

Program BKB merupakan bagian dari strategi BKKBN dibawah naungan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak). Di desa program BKB berada dibawah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh ketua Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB dibantu sekretaris dan bendahara, serta penanggung jawabnya ketua TPPS desa, menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Sebelumnya BKB berada dibawah naungan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) desa.

Program BKB ini dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak usia balita melalui asuh yang tepat, pemberian gizi yang cukup dan stimulasi

perkembangan yang optimal. Tujuan utama dari program BKB adalah untuk membekali keluarga, khususnya orang tua balita dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara fisik, mental dan emosional. Mengembangkan pemahaman orangtua tentang pentingnya tahun-tahun awal kehidupan anak sangatlah penting. Orangtua perlu memiliki keterampilan pengasuhan dan stimulasi yang efektif dan praktis, juga komitmen untuk mendorong tumbuh kembang dan perlindungan anak (Direktorat BKB dan Anak, 2022:4).

Dalam upaya untuk menyukseskan program kependudukan dan keluarga berencana, BKKBN melibatkan Penyuluhan Keluarga Berencana (seterusnya disebut PKB) untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. PKB merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga/BKKBN. PKB ditugaskan di kabupaten/kota untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan tentang program kependudukan dan keluarga berencana kepada masyarakat.

Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) adalah pegawai dengan status jabatan fungsional. Jabatan fungsional berfokus pada keahlian teknis atau keterampilan spesifik dibandingkan tugas-tugas administratif. PKB di kabupaten Bireuen berada dalam naungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana (UPTDKB) selaku koordinator yang di kepala oleh seorang Ka. UPTDKB ditingkat kecamatan. UPTDKB tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen, mulai dari Kecamatan Gandapura sampai Kecamatan Samalanga. Walaupun demikian, segala bentuk administrasi PKB tetap berada dibawah perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.

PKB juga memiliki organisasi profesi yang disebut dengan IPeKB (Ikatan Penyuluhan Keluarga Berencana) yang berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan PKB. Organisasi ini juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PKB. Ditingkat kabupaten/kota terdapat dewan Pimpinan Cabang (DPC) IPeKB, ditingkat provinsi ada Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPeKB dan ditingkat nasional ada Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPeKB.

PKB bertugas didesa untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan tentang program kependudukan dan keluarga berencana kepada masyarakat. Seperti memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Poktan BKB, melakukan pembinaan kader KB, mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Data dari hasil pencatatan dan pelaporan PKB menunjukkan progress program BKB tahun 2023 di Kecamatan Juli, jumlah anggota BKB yang mengikuti pertemuan hanya 235 orang, sedangkan tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah anggota BKB yang mengikuti pertemuan mencapai angka 1.099 orang. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keberhasilan PKB dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan program BKB kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh PKB memainkan peran strategis dalam memperkenalkan dan mempromosikan Program BKB. PKB harus mampu menggunakan strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Berdasarkan wawancara awal dengan PKB pembina wilayah desa-desa yang berada di kemukiman Juli selatan yang berbatasan dengan kabupaten Bener Meriah di Kecamatan Juli menunjukkan bahwa komunikasi yang telah dilakukan oleh PKB yaitu

kegiatan penyuluhan dan pembinaan, baik kepada masyarakat anggota kelompok BKB maupun kader KB. selain itu, PKB juga mensosialisasikan program BKB menggunakan media komunikasi seperti banner dan spanduk. Proses ini tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga upaya untuk mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang balita.

Namun demikian, program BKB di desa belum terlaksana dengan baik, tantangan sering kali muncul, terutama karena faktor geografis, desa-desa di wilayah kemukiman juli selatan merupakan daerah perbatasan antara kabupaten Bireuen dan kabupaten Bener Meriah, letaknya jauh dari kantor UPTDKB kec. Juli dan juga jauh dari pusat kota Bireuen. Selain itu, rendahnya SDM kader, tingkat pengetahuan ibu anggota BKB yang rendah dan kurangnya minat anggota untuk mengikuti kegiatan serta tidak ada dana penggerak kegiatan. Hal tersebut menghambat PKB dalam mensosialisasikan program BKB.

Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen sendiri memiliki luas wilayah sebesar 175,96 km² yang terdiri dari 36 desa dan 35.993 jiwa (BPS Kabupaten Bireuen, 2024). Batas daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah di Aceh telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen Dengan Kabupaten Bener Meriah di Aceh. Menurut peraturan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 2 desa yang berdekatan dengan perbatasan antara Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah yaitu, desa Suka Tani, desa Krueng Simpo.

Menurut website SIGA (Sistem Informasi Keluarga), desa Suka Tani dan Krueng Simpo, Jumlah keseluruhan penduduknya adalah 1.728 jiwa, dengan mata

pencaharian utama sebagai petani/pekebun. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang tidak/ belum bersekolah sebanyak 304 jiwa. Penduduk tidak lulus SD 236 jiwa. Lulusan SD sebanyak 384 jiwa. Lulusan SMP 367 jiwa. Lulusan SMA 352 jiwa. Terakhir lulusan perguruan tinggi sebanyak 40 jiwa. Sedangkan jumlah balita dari keempat desa adalah 41 jiwa.

Berdasarkan data dari SIGA yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan di desa-desa tersebut, maka dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menerima suatu inovasi. Selain itu tingkat pendidikan juga mempengaruhi ekonomi masyarakat. jika dibandingkan dengan desa-desa yang dekat dengan perkotaan, kedua desa yang berdekatan dengan wilayah perbatasan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi PKB untuk mensosialisasikan program BKB. Keterbatasan akses informasi, dan pengaruh tradisi lokal sering kali menjadi hambatan dalam penerimaan program-program pemerintah. Selain itu, minimnya infrastruktur dan jarak geografis yang jauh juga memperlambat proses penyebaran informasi. Menurut kepala UPTDKB kec. Juli, jumlah balita juga mempengaruhi sikap masyarakat terhadap program BKB, karena jumlah balita yang sedikit, masyarakat menganggap bahwa program BKB itu tidak penting.

Penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam tentang komunikasi yang diterapkan oleh PKB kepada masyarakat kemukiman Juli selatan (yang masuk kedalam wilayah perbatasan antara dua kabupaten) dalam mensosialisasikan program BKB yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi digital, komunikasi persuasif dan komunikasi formal, dengan menggunakan poin-poin dari teori difusi inovasi yaitu, pengetahuan, persuasi,

keputusan, implementasi dan konfirmasi. Bagaimana hambatan yang dihadapi, serta respon masyarakat terhadap Program BKB.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bentuk komunikasi yang dilakukan Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dalam mensosialisasikan program Bina Keluarga Balita yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi digital, komunikasi persuasif, dan komunikasi formal.
2. Program BKB yang disosialisasikan berfokus pada perkembangan anak yang dilihat dari sudut pandang tahapan teori difusi inovasi yaitu, pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.
3. Kemukiman Juli Selatan dalam penelitian ini di khususkan menjadi 2 desa yaitu, desa Suka Tani dan desa Krueng Simpo.
4. Hambatan dalam penelitian ini adalah hambatan personal, hambatan fisik dan hambatan semantik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan penyuluhan keluarga berencana dalam mensosialisasikan program Bina Keluarga Balita (BKB) kepada masyarakat Kemukiman Juli Selatan di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana hambatan yang dilalui oleh penyuluhan keluarga berencana dalam mensosialisasikan program Bina Keluarga Balita kepada masyarakat Kemukiman Juli Selatan di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk komunikasi yang diterapkan oleh penyuluhan KB kepada masyarakat Kemukiman Juli Selatan dan juga bagaimana hambatan yang dihadapi oleh penyuluhan KB dalam mensosialisasikan program Bina Keluarga Balita kepada masyarakat Kemukiman Juli Selatan di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan akademik tentang penyuluhan program BKB khususnya di wilayah perbatasan. Penelitian ini juga dapat menjadi literatur dalam bidang komunikasi.
2. Bagi penyuluhan, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi PKB dalam mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih efektif dan inovatif.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan dasar teori yang relevan untuk memahami pentingnya program BKB sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya tumbuh kembang anak balita di lingkungan keluarga.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam melakukan kajian lapangan dan analisis kualitatif, yang dapat menjadi bekal penting dalam karir akademik atau profesi di masa depan.
2. Bagi penyuluhan, Memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas penyuluhan, seperti pendekatan komunikasi yang interaktif. Dapat

juga digunakan sebagai panduan untuk menyesuaikan materi atau metode penyuluhan sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan.

3. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat program BKB, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif. Juga untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui penerapan program yang lebih efektif, terutama dalam aspek pengasuhan, pendidikan dan kesehatan balita.